

## ABSTRAK

### **Pelaksanaan Penertiban Pasar Raya Padang Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 oleh Pemerintah Kota Padang**

**Oleh : Roby Hadi Putra**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya bangunan toko/kios yang runtuh akibat gempa sehingga mengakibatkan kesemrawutan pasar, serta kurang optimalnya pelaksanaan penertiban Pasar Raya pasca gempa karena jumlah aparat tidak seimbang dengan jumlah pedagang yang terus bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang kondisi Pasar Raya Padang serta mengenai pelaksanaan penertiban Pasar Raya Padang pasca gempa bumi 30 September 2009 oleh Pemerintah Kota Padang Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban Pasar Raya Padang, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Penertiban Pasar Raya pasca gempa bumi 30 September 2009.

Jenis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian adalah Dinas Pasar, Kantor Satpol PP Kota Padang,serta para pedagang dan pengguna pasar di kawasan Pasar Raya Padang.Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik *Purposive*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi dokumenter. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Kemudian data diolah dengan model analisis interaktif, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa bangunan rusak diakibatkan gempa dan menungetahui bahwa pelaksanaan penertiban Pasar Raya Padang pasca gempa bumi 30 September 2009 Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan penertiban pasar didasarkan pada Perda No. 08 Tahun 2002 dan Perda No 11 Tahun 2005 dalam bentuk Program Pembinaan, Penataan dan Penertiban Pasar. Realisasi tersebut dijabarkan dalam tahapan kegiatan meliputi sosialisasi, penataan, pembinaan, dan penertiban. Dalam penertiban ditemui beberapa kendala yaitu (1) Sumber daya manusia yang tidak memadai (2) sarana dan prasarana yang terbatas sehingga dalam pelaksanaan penertiban pasar belum terlaksana dengan optimal. (3) Pelanggaran yang dilakukan PKL dan (4) Adanya premanisme. Agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan efektif, maka peneliti menyarankan agar pemerintah Kota Padang harus meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara instansi terkait yang terlibat langsung dalam melaksanakan penertiban pasar ini diantaranya Dinas Pasar dan Satpol PP sehingga saling terhubung dan terjaga baik. Serta dalam pelaksanaan penertiban sarana prasana haruslah dilengkapi demi mengoptimalkan dalam penertiban Pasar Raya Padang.